

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Indeks Permata Putri Media, 2009)
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Danial dan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009).
- Endro Martono, Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).
- G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Cetakan I'* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020).
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017)
- Khaeruman, *Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep Dan Studi Kasus* (Banten: AA Rizky, 2021).
- Moleong Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).
- Subarsono AG, *Analisis kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).

## Jurnal

- Arief Dwi Adyatma, “Analisis Yuridis Masa Kerja Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, 14. no. 2 (2021): 149-159.
- Eldian Alfiyanda Silalahi, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan di Bidang Jasa (Studi Pada PT. Rajawali Bhirawa Sejahtera)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependataan*, 6, no. 4 (2022) : 393-402.
- Ere Mardella Arbiani, dkk. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru SMA Negeri di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 3. no.2 (2019): 104-115.
- Haedar Akib. “Analisis Implementasi,” *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2010): 1-11.
- I Nyoman Gede Remaja dan I Komang Kawi Arta, “Mekanisme Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 7, no.1 (2023): 120-126
- Jevon Adijenda Parkher dan Dasril Radjab, “Pengaturan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Sistem Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan, Limbago” *Journal of Constitutional Law*, 1, no. 1 (2021): 481-501.
- Lagina Nadhila Qomari, “Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Cakrawala Kepegawaian di Indonesia”, *Jurnal Cepalo*, 4. no.2 (2020): 95-110.
- Made Putra Jaya Amarta, Oka Martini, “Penerapan Pemotongan Tunjangan Kinerja Anggota BID TIK Polda Bali Yang Ditentukan Dalam Kehadiran Jumlah Kerja”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2. no.2 (2023) : 64-73.
- M. Aditya Mulana Rangkuti, dkk. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9, no. 11 (2023): 775-800.
- M. Anton Nurhidayat, “Analisis Penerapan Disiplin Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kelurahan Pondok Ranji Tangerang Selatan”, *Jurnal Tadbir Peradaban*, 2, no. 2 (2022). 224-233.

- Novan Mamonto, dkk. “Implementasi pembangunan infrastruktur dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (2018): 1-11.
- Rike Anggun Artisa, “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 6, no. 1 (2015) : 33-42.
- Samsara, “Tantangan Dalam Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Pemenuhan Kesenjangan Kompetensi Seperti Pegawai Negeri Sipil Atau Pengayaan Kompetensi”, *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 8, no. 1 (2023) : 9-17.
- Satya Suryo Harjanto, “Penyelesaian Sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Upaya Administratif” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 9, no. 4 (2022): 1319-1330.
- Tri Widhi Ayusari, dkk. “Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Kewajiban Kepegawaian (Studi Di Kabupaten Banyumas)” *Jurnal S.L.R.* 2, no.1 (2019): 58-71.
- Umu Kholifah, Pompong B. Setiadi, Fanny Dwi, “Pengaruh Sanksi Pemotongan Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Disiplin Dan Motivasi Kerja Sebagai Variable Mediasi”, *Jurnal Cakrawala*, 7, no. 1 (2024). 205-214.
- Wahyudi Kumorotomo, “Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai: Kasus di Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta”, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 5, no. 1 (2011) : 21-34.

### **Instrumen Hukum**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- Keputusan Bupati Bintang Nomor 13/PPPK/VIII/2023 tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- BPSDM, "Sistem Informasi Manajemen Online Kurikulum Kediklatan," Si-Monika  
<https://bpsdmd.jatengprov.go.id/simonika/index.php?page=item&id=183>. Di akses pada 25 Juli 2024